

Evaluasi dan rancangan sistem e-government repository produk hukum sebagai implementasi fungsi deposit di perpustakaan RI

Irhamni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920564219&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah tatanan birokrasi sehingga Pemerintah RI harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government. Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan layanan publik informasi terbitan pemerintah berdasarkan UU Deposit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan melakukan perancangan sistem e-government melalui repositori hukum peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur agar lebih mudah ditemukan, lebih fleksibel dalam pencarian serta terintegrasi sehingga termutakhirkan. Metodologi penelitian ini adalah melakukan evaluasi dan perancangan repositori produk hukum. Sampel diambil berdasarkan pada pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2013 yang berpredikat baik. PeGI diperoleh 12 kementerian 10 lembaga non kementerian, 4 provinsi dan 8 kabupaten/kota. Penelitian ini mengevaluasi komponen repositori yang terdiri atas komponen manajemen repositori, komponen interoperabilitas serta komponen human computer interface serta wvaluasi kepuasan pengguna berdasarkan pada QUIS (Questionnaire Of User Interface Satisfaction) terhadap aspek usability serta aspek layanan. Data yang diperoleh diolah dalam bentuk sebaran frekuensi sebaran ketersediaan komponen repositori dalam bentuk persentase dan sebaran rata-rata pada dimensi usability dan dimensi layanan. Pengembangan sistem dilakukan setelah evaluasi sistem yang sedang berjalan Desain sistem baru dibuat berdasarkan rekomendasi atas hasil evaluasi sistem yaitu membuat proses bisnis dan arsitektur sistem serta tampilan user interface yang sesuai standar guna meningkatkan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menyatakan bahwa portal e-government bidang repositori produk hukum di Indonesia belum terstruktur, terintegrasi, serta fleksibel. Pengujian menunjukkan belum terstrukturnya komponen manajemen repositori, Pengujian aspek interoperabilitas menunjukkan penggunaan metadata standar belum diterapkan, sementara itu pada ketidakfleksibelan terlihat pada komponen human computer interaction khususnya dalam terlihat ketersediaan fasilitas pencarian. Demikian pula pada aspek usability dan layanan ditemukan masih ada pengguna sistem masih belum puas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah portal e-government layanan terbitan hukum belum efisien, efektif serta belum terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan dengan desain sistem yang sesuai standar melalui perancangan ulang proses bisnis dan desain antar muka sistem.